

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

10

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
	✓												

Ketua BPK: Jika Ada yang Menawarkan Pertahankan Opini WTP Abaikan!

KALIANDA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Lampung melakukan *entry meeting* dengan kepala daerah se-Lampung secara virtual dari kantor BPK perwakilan Lampung, Rabu (27/1). Di Lampung Selatan (Lamsel), *entry meeting* diikuti Bupati Nanang Ermanto didampingi Sekretaris Kabupaten (Sekcab) Thamrin beserta seluruh pejabat dan kepala OPD.

Kepala BPK perwakilan Lampung Andri Yogama mengatakan kegiatan ini untuk pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2020 pada Pemerintah Daerah se-Lampung. "Kami mohon maaf, *entry meeting* ini

secara daring, karena masih pandemi. Mari kita manjatkan doa kepada Allah SWT agar pandemi Covid-19 cepat berlalu dan kita diberi kekuatan melewati pandemi ini," kata Andri.

Andri menjelaskan, pemeriksaan rinci laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK akan dijalankan selama 30-35 hari kedepan, sebelum terbitnya LKPD.

Ia juga mengingatkan kepada para kepala daerah untuk bersama-sama menjaga agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan kondusif. "Jadi, kalau ada tawaran untuk mempertahankan atau meningkatkan opini dari internal atau pihak lain, tolong diabaikan. Karena opini ini hasil kerja keras dari bapak



ibu sekalian. Bukan dari orang lain atau pihak lain," tukas Andri Yogama.

Dirinya juga meminta para kepala daerah untuk tidak menjanjikan atau memberikan imbalan kepada tim yang melakukan pemeriksaan di masing-masing pemerintah daerah. "Karena mereka akan menerima sanksi, bukan hanya satu tetapi dua. Pertama pelanggaran kode etik dan hukuman disiplin PNS. Kami hanya menilal, apapun nilainya

itu hasil kerja keras dari bapak ibu," tandasnya.

Di Pesawaran, Bupati Dendi Ramadhona juga mengikuti *entry meeting* itu. Ada empat poin kata Dendi yang ditekankan BPK Lampung. "Yang paling utama bagaimana di Maret ini kita harus sudah menyiapkan laporan. Dan entitas pemeriksaan sudah dislapkan," ungkap Dendi.

Terhadap pengelolaan keuangan tahun anggaran 2020, pemerintah daerah

ménargetkan laporan keuangan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sedangkan Bupati Tulangbawang (Tuba) Winarti menjelaskan Pemkab akan menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan. "Kami akan mengikuti prosedur dan regulasi yang telah ditetapkan BPK Lampung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat," kata Winarti. (yud/ozl/nal/c1/nca)